

ANOMIE DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL

Rusydi Syahra¹

ABSTRACT

It has become an awareness to many that in addition the visible economic and monetary crisis on the surface, Indonesia is currently undergoing a multidimensional crisis that has resulted in social discontent and intergroup conflicts in various parts of the country. It is widely held that the main cause of all the crises is the disruption of moral authority on the part of government officials and the military due to the widespread mismanagement of the past government. This article is devoted to explain the current multidimensional crisis and its destabilizing impact on the society from the sociological concept of anomie. The concept, first introduced in the turn of the 19th century by Emile Durkheim, a grand theorist of sociology, seeks to explain the nature of normlessness or anomie on the part of individuals and the whole society as the result of a tremendous and sudden social change. Further, a brief account is provided on how the concept has been developed and used until recently by a number of social scientists in explaining the impacts of political turmoil and profound economic changes on national security and societal living condition of many countries of the world. The article finally suggests a method that could be developed to detect and prevent social conflicts and unrests that may take place in the future.

¹ Peneliti pada Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta.

Pendahuluan

Ketika baru terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan dari orde baru dan transisi kepada orde reformasi yang lebih demokratis sekarang ini banyak orang berpengharapan krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia akan segera dapat teratasi. Berbagai upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi dan menciptakan pemerintahan yang bersih memang telah dilakukan. Tetapi parahnya krisis dan kerusakan yang terjadi dalam hampir segala bidang kehidupan bangsa hingga saat ini telah menyebabkan upaya yang telah ditempuh pemerintah dan segenap lembaga yang berwenang belum berhasil menunjukkan tanda-tanda yang jelas menuju perbaikan.

Tertekan oleh kesulitan hidup di bidang ekonomi dan sejumlah masalah lainnya yang menyangkut hak asasi yang telah berlarut-larut dialami banyak warga masyarakat menjadi kehilangan kesabaran. Akhirnya banyak yang mencoba menyelesaikan dengan cara sendiri-sendiri, di luar koridor hukum dan peraturan yang ada dan norma-norma kehidupan sosial yang normal. Dan tampaknya sebagian masyarakat menganggap hukum dan peraturan memang ada tapi tidak lagi berlaku, karena para aparat bersangkutan sendiri yang seharusnya menegakkan justru telah melanggarnya dan tokoh-tokoh yang diharapkan menjadi panutan masyarakat telah mengalami erosi wibawa dan kehilangan otoritas moral akibat berbagai kondisi yang berada di luar kemampuan dan kontrolnya.

Dalam manifestasi konkritnya tindakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri itu telah bermuara pada berbagai kasus konflik dan kerusuhan sosial di beberapa wilayah tanah air yang sebagian masih berlangsung hingga saat ini. Berbagai cara dan pendekatan telah dilakukan untuk mengatasinya. Tetapi sejauh ini hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan. Jangankan semakin surut di berbagai tempat konflik dan kerusuhan sosial justru semakin meluas dan berkembang. Oleh karena itu tampaknya diperlukan adanya pendekatan lain yang lebih didasarkan pada pemahaman tentang proses sosial yang berlangsung di tengah-tengah perubahan mendasar yang dialami bangsa ini akibat pengaruh global yang semakin menguat di berbagai bidang kehidupan.

Sehubungan dengan asumsi di atas maka tulisan ini berusaha untuk menjelaskan krisis multidimensional yang sedang dihadapi sekarang ini melalui konsep anomie. Konsep ini digunakan pertama kali oleh Emile Durkheim, salah seorang tokoh peletak dasar sosiologi klasik, dalam upaya memberi interpretasi terhadap proses perubahan sosial mendasar yang terjadi dalam masyarakat Perancis sebagai dampak dari revolusi industri. Selanjutnya akan dipaparkan bagaimana konsep tersebut telah dikembangkan menjadi lebih operasional oleh sejumlah pakar ilmu-ilmu sosial sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan proses perubahan sosial yang berlangsung di berbagai negara menjelang akhir abad yang lalu. Tulisan ini diakhiri dengan menyarankan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memahami kompleksitas permasalahan sosial yang sedang dihadapi serta cara alternatif untuk pemecahannya.

Krisis dan Ketidakpastian

Suatu hal yang barangkali dapat dirasakan oleh masyarakat luas adalah kondisi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya bangsa kita sedang mengalami kompleksitas kesulitan yang luar biasa sehingga tidak seorang tokoh dan pakar pun merasa memiliki formula untuk mengatasinya secara meyakinkan. Masalah yang dihadapi sangat kompleks karena krisis telah melanda hampir seluruh aspek kehidupan bangsa. Mulai dari krisis ekonomi, politik, moral dan akhlak, krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan mulai dari tingkat teratas sampai pada tingkat terendah, krisis kepercayaan kepada aparat keamanan yang seyogyanya menjadi pengayom masyarakat, bahkan krisis saling tidak percaya (*mutual distrust*) antara sesama warga bangsa sendiri.

Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mengungkapkan siapa yang menjadi provokator dan dalang - atau istilah populer lainnya "otak intelektual" - di balik berbagai peristiwa yang terjadi, jelas krisis yang sangat kompleks ini telah menyebabkan semakin meluasnya rasa tidak tenteram dan tidak pasti dalam masyarakat. Rasa tidak pasti itu menjadi diperbesar dengan adanya berbagai kebijakan yang berubah-ubah, pernyataan serta ucapan-ucapan para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang sering tidak konsisten dan saling bersimpang siur. Akibatnya masyarakat

menjadi kehilangan pegangan nilai, keyakinan dan kemampuan untuk bisa menempatkan diri secara wajar dalam konstelasi kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang sedang mengalami *gloomy days* atau masa-masa paling suram sebagai dampak dari dan reaksi terhadap mismanajemen negara yang telah berlangsung selama lebih tiga dasawarsa pada waktu pemerintahan yang lalu.

Anomie dan Perubahan Sosial

Keadaan tanpa pegangan dan nilai untuk memahami kondisi dan perubahan yang sedang berlangsung atau *normlessness* seperti disebut di atas ini di dalam bidang kajian sosiologi klasik disebut dengan istilah *anomie*. Kondisi yang disebut *anomie* ini selalu menyertai setiap perubahan sosial yang terjadi. Tinggi rendahnya kadar anomie itu sebanding dengan seberapa cepat dan besar perubahan yang terjadi. Dalam perubahan sosial yang terjadi secara perlahan-lahan, apalagi jika perubahan itu masih dalam batas-batas kerangka dan sistem nilai sosial dan budaya yang menjadi dasar pedoman sikap dan perilakunya, masyarakat akan dapat memberi makna dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.

Namun sebaliknya bila perubahan itu sedemikian besar dan berlangsung dengan cepat perangkat norma dan nilai yang dimiliki masyarakat tidak akan mampu menjadi alat pemberi makna atas perubahan yang terjadi. Akibatnya banyak individu atau kelompok dalam masyarakat akan menjadi *gelagapan* dan kebingungan, dan merasa teralienasi dari lingkungan hidupnya sendiri. Keadaan seperti ini bisa membuahkan tingkat anomie yang cukup parah. Tidak dimilikinya sistem nilai yang kompatibel guna menentukan sikap dan perilaku terhadap perubahan situasi bisa menyebabkan orang merasa tidak yakin suatu tindakan yang akan dilakukan salah atau benar. Selain itu juga bisa muncul perasaan tidak puas karena kehilangan kontrol terhadap situasi, menjadi pesimis karena berada pada posisi yang tidak menguntungkan, serta kehilangan kepercayaan terhadap segala institusi sosial yang ada. Apalagi jika orang-orang yang menjadi bagian dari institusi itu pun ternyata juga mengalami anomie.

Dengan berakumulasinya semua ciri-ciri negatif dari anomie ini dapat dipahami perilaku-perilaku agresif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain akan dengan mudah terjadi. Sebagaimana

ditemukan Durkheim di kalangan masyarakat Perancis pada abad 19, tekanan berat yang dialami seseorang karena runtuhnya norma-norma sosial yang sebelumnya menjadi pegangan hidup akibat berlangsungnya perubahan sosial yang sangat mendasar telah menempatkan warga masyarakat pada suatu keadaan anomis karena berada dalam situasi yang samasekali tidak dapat dipahaminya. Keadaan semacam ini dianggap Durkheim sebagai salah satu penyebab untuk melakukan bunuh diri atau yang disebut *anomic suicide*.

Gejala yang sebaliknya justru ditemukan secara luas pada bangsa kita. Karena kita memiliki watak budaya yang berbeda (tidak jelas apakah *guilt-culture* atau *shame-culture*), seseorang yang mengalami anomie, yang tidak puas dengan situasi dan kondisi kehidupan yang tidak menentu, malahan cenderung menyakiti atau bahkan membunuh orang lain atau *anomic homicide*. Melalui pemberitaan di berbagai media massa dapat diketahui setiap hari ada saja peristiwa pembunuhan yang sebagian besar berlatar belakang hal-hal yang sangat sepele. Dalam skala lebih luas anomie kolektif yang disertai dengan tidak adanya kesadaran hukum (*judiciary consciousness*) juga sering memicu terjadinya *anomic homicide* yang dilakukan oleh sekelompok anggota dari masyarakat tertentu, seperti pembunuhan orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Perilaku destruktif yang mereka lakukan lebih didasarkan pada kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang bersifat primitif. Dapat dikatakan, misalnya, hanya orang-orang yang telah kehilangan pegangan akan norma-norma kehidupan manusia yang beradab dan bermoral, yang mampu secara beramai-ramai menyiramkan bensin dan kemudian membakar hidup-hidup sesama warga desa yang belum jelas kadar kesalahannya.

Anomie dan Modernisasi

Arus besar perubahan sosial yang terjadi mulia pada penghujung yang lalu, yang telah membawa kepada situasi anomis yang sangat luas itu, pada dasarnya disebabkan oleh perkembangan pesat atau revolusi di bidang teknologi dengan berbagai produk yang menjadi ciri kehidupan modern, seperti komputer dan alat-alat telekomunikasi mutakhir, dan sekaligus dengan efek ganda atau *multiplier effect* serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Keinginan untuk turut melakukan

proses modernisasi itu nyata sekali juga telah melanda negara-negara berkembang. Proses modernisasi yang ditandai dengan industrialisasi serta globalisasi itu telah menimbulkan perubahan baik positif maupun negatif pada hampir segala bidang kehidupan.

Peter Atteslander (1995), direktur *Swiss Institute of Development* (SID) mengatakan bahwa pengambilalihan pandangan hidup masyarakat industri modern yang secara sosial dan kultural tidak kompatibel oleh masyarakat di bagian lain di bumi ini, dan bahkan juga peniruan pandangan semacam itu secara tidak sengaja oleh masyarakat di daerah pinggiran dari negara maju sendiri dapat menimbulkan kerusakan pada pola-pola hubungan penuh makna dan identitas tradisional, suatu kerusakan yang tak mungkin terpulihkan. Akibatnya kebudayaan semakin kehilangan kemurniannya, sementara pola-pola orientasi dan interpretasi nilai yang samasekali tidak ada kaitan dengan modernisasi sendiri juga semakin kelihatan.

Selanjutnya Atteslander mengatakan pembenturan dan akulturasi kebudayaan-kebudayaan yang sudah lebih maju pada masyarakat yang lebih terbelakang akan mengarah pada percepatan atau akselerasi sosial dan perubahan pada gaya hidup tradisional. Dalam jangka panjang sikap dan perilaku tertentu yang sifatnya reaktif tidak akan mampu menahan akselerasi yang disebabkan kecenderungan modernisasi ini. Akhirnya kehidupan kolektif dalam suatu komunitas mengalami erosi. Akibat lanjutnya adalah anggota masyarakat pendukung kehidupan kolektif itupun mengalami anomie.

Atteslander berpendapat anomie bisa merusak struktur sosial tanpa terpulihkan, sebaliknya perubahan sosial tidak mungkin terjadi tanpa disertai anomie. Oleh karena itu sebuah pertanyaan yang perlu mendapat jawaban adalah sejauh mana proses anomie itu dapat dikatakan positif dari sudut pandang pembangunan masyarakat dan kapan bisa punya sifat negatif. Jawaban terhadap pertanyaan semacam ini tentu tidak dapat diperoleh hanya dengan melalui pengamatan sepintas. Suatu penelitian yang mendalam tentang keseluruhan proses perubahan sosial yang membawa anomie itu perlu dilakukan.

Guna memahami anomie serta kaitannya dengan pembangunan dan modernisasi Atteslander (1995) mengemukakan beberapa proposisi yang dapat dijadikan pegangan.

1. Yang mengguncang kestabilan kehidupan kolektif bukanlah perubahan sosial itu sendiri tetapi akselerasi yang berlangsung

- sangat cepat sebagai akibat proses pembangunan yang hendak menjangkau segala sesuatu yang jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ketidakmampuan mengikuti kecepatan perubahan itulah yang membawa akibat ambruknya keteraturan dalam kehidupan masyarakat.
2. Masyarakat yang terkena bisa bertahan menghadapi perubahan sosial selama ada pola-pola interpretasi yang bersumber pada sistem nilai budaya yang dimiliki, yang dapat digunakan secara berulang-ulang untuk menafsirkan secara bermakna setiap perubahan kenyataan yang terjadi.
 3. Anomie membawa krisis ketenteraman kepada masyarakat luas. Pola-pola interpretasi kultural yang ada menjadi kehilangan arti, integrasi sosial suatu komunitas menjadi melemah dan terjadi individualisasi. Norma-norma perilaku yang sebelumnya berlaku dan otoritas pribadi mengalami disintegrasi. Hal ini disebabkan persaingan dan efisiensi mengharuskan mobilitas mental yang lebih cepat pada setiap individu.
 4. Anomie membawa benih destabilisasi kepada setiap struktur yang kena imbasnya. Ketidakstabilan yang paling parah adalah ketidakstabilan yang menghambat pembangunan. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipertimbangkan potensi anomie pada masyarakat yang berkenaan, baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Keempat butir proposisi yang diajukan Atteslander di atas jelas menyarankan bahwa pemahaman yang memadai terhadap tingkat anomie yang muncul dalam setiap perubahan, terutama yang berlangsung dengan akselerasi tinggi, perlu dimiliki. Untuk itu pengkajian komprehensif dengan menggunakan perangkat pendekatan teori dan metodologi yang sesuai merupakan suatu langkah yang perlu dipertimbangkan. Dalam penetapan kebijakan pembangunan, misalnya, analisis anomie perlu dipertimbangkan sebagai suatu keharusan. Adanya suatu studi kelayakan dengan menggunakan konsep anomie akan dapat diperkirakan tingkat keberhasilan setiap proyek pembangunan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Studi tentang Anomie dalam Pembangunan

Sebagaimana telah dikatakan konsep anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim, seorang bapak sosiologi Perancis, pada akhir abad yang lalu. Durkheim mendefinisikan anomie sebagai keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena penjungkirbalikan status dan peran sosial akibat perubahan dalam pembagian pekerjaan dalam masyarakat atau *social division of labor* sebagai salah satu dampak revolusi industri. Durkheim menemukan keadaan anomie dalam kaitan dengan kehilangan status dan peran sosial ini merupakan salah satu alasan orang untuk bunuh diri (Thomson, 1985).

Konsep anomie kemudian diangkat ke dalam suatu pengertian yang lebih luas beberapa dasawarsa kemudian oleh Robert K. Merton (1957). Agak berbeda dengan Durkheim yang lebih menelaah gejala anomie dalam hubungan antara individu dan struktur sosial, Merton lebih melihat kaitan anomie dengan struktur sosial dan struktur budaya. Dikatakannya lingkungan hidup setiap individu mencakup struktur sosial dan struktur budaya. Anomie timbul karena rusaknya sistem nilai budaya. Ini terutama terjadi ketika seorang individu dengan kapasitas yang ditentukan struktur sosial tiba-tiba kehilangan kemampuan menyelaraskan tindakannya dengan norma-norma dan tujuan budaya. Dengan kata lain anomie terjadi bila struktur budaya tidak lagi berjalan selaras dengan dan didukung oleh struktur sosial yang berlaku.

Konsep anomie sebagai alat analisis perubahan sosial kembali mendapatkan tempat yang penting ketika terjadi perubahan tatanan politik dan ekonomi di banyak negara di dunia menyusul berakhirnya Perang Dingin. Selain itu, berbagai dampak sosial yang timbul akibat kebijakan pembangunan dan modernisasi di banyak negara berkembang juga pendekatan anomie menjadi penting. Berangkat dari kedua kenyataan ini sekelompok ilmuwan sosial terkemuka, termasuk Robert K. Merton dan Johan Galtung, yang tergabung dalam wadah *Swiss Institute of Development (SAD)* seperti telah disebut di atas, kemudian mengadakan penelitian tentang anomie di berbagai negara di Afrika, Amerika Latin, Asia dan Australia selama tahun 1996 dan 1997.

Dalam sidang pertemuan SID yang diadakan di Johor Bahru bulan Pebruari 1998 telah disampaikan laporan temuan dari penelitian yang dilakukan selama dua tahun tersebut. Beberapa temuan dan rekomendasi penting dalam kaitan dengan pembangunan yang perlu diungkapkan di sini adalah:

1. Anomie akan timbul dengan jelas apabila pola-pola hubungan sosial yang ada terganggu, baik karena proses perubahan masyarakat ataupun sebagai dampak dari kekuatan destabilisator terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat
2. Dalam hal terjadi peningkatan anomie, proyek-proyek yang dimaksudkan untuk pembangunan bidang ekonomi harus disertai dengan pengukuran tingkat *social acceptance* atau penerimaan masyarakat yang terkena proyek-proyek tersebut. Aparat dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan proyek harus mengetahui dengan pasti tingkat penerimaan tersebut.
3. Setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan haruslah menyertakan orang-orang yang ahli dalam mengelola perubahan sosial. Adalah suatu keharusan untuk meningkatkan derajat penerimaan masyarakat terhadap proyek pembangunan oleh kelompok-kelompok yang paling langsung berurusan dengan pelaksanaan proyek itu.

Bercermin pada temuan dan rekomendasi di seperti atas dapat kiranya dipahami mengapa banyak sekali proyek pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah tanah air yang pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pendekatan *top down* dan *target oriented* serta kurang sekali memperhatikan *social acceptance* telah menimbulkan rasa tidak puas yang berlarut-larut pada masyarakat yang terkena dan menyisakan banyak masalah yang tak kunjung terselesaikan hingga sekarang ini. Kasus Kedungombo, misalnya, merupakan suatu contoh yang monumental. Sementara itu sebagaimana dikatakan Michael Cernea (1995), konsultan sosial senior pada Bank Dunia, di beberapa negara program-program bantuan pembangunan yang terlalu ekonosentris, teknosentris dan komodosentris, dan tidak menjadikan tingkat penerimaan masyarakat sebagai salah satu variabel penting, banyak mengalami kegagalan.

Di era reformasi ini ketika masyarakat mulai memperoleh keleluasaan untuk menyampaikan protes terhadap perlakuan tidak adil

yang dialami, terungkap betapa banyaknya kasus proyek pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengindahkan *social acceptance*. Dari berbagai kasus yang mencuat kembali belakangan ini, seperti kasus pembebasan lahan oleh para konglomerat untuk perkebunan kelapa sawit, lapangan golf serta banyak kasus lainnya menyangkut pembebasan lahan untuk industri dan pemukiman mewah, tampak bahwa asas legalitas semata tidak cukup dijadikan alasan untuk menggusur para petani atau pemilik dari lahan yang telah mereka garap atau miliki secara turun-temurun. Menggunakan konsep Merton di atas, dalam hal ini dengan jelas kelihatan struktur sosial yang dominan tidak sejalan dengan struktur budaya yang dipahami oleh petani sederhana.

Ketika rasa keadilan sebagai salah satu dari nilai-nilai sosial budaya yang dipahami terusik, masyarakat sedikit atau banyak merasa apa yang menjadi haknya direnggut atau *relative deprivation*, maka anomie pun muncul. Akumulasi berbagai masalah yang timbul sebagai pelaksanaan pembangunan yang *socially unacceptable* selama puluhan tahun terakhir tampaknya tidak lagi sekedar melahirkan *relative deprivation* bahkan telah meningkat sebagai *absolute deprivation*. Dengan demikian derajat anomie yang terjadi juga mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Anomie di Tengah Arus Reformasi

Direktur Pusat Penelitian Pembangunan Universitas Neuchatel, Jean-Pierre Gern (1995), mengatakan anomie yang muncul dalam perubahan sosial di berbagai negara dewasa ini tampaknya tidak dapat dianggap bersifat positif, kecuali dalam beberapa hal seperti meningkatnya mobilitas sosial. Alasannya, tidak terdapat perasaan kolektif akan adanya transisi menuju suatu tatana sosial baru dengan ciri-ciri yang bisa diramalkan. Yang lebih terasa adalah bahwa tatanan sosial yang kompleks yang mampu mewujudkan kebutuhan semua warga masyarakat umumnya (di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan) dan kebutuhan dunia usaha (untuk menghadapi siklus perdagangan global atau perubahan struktural) telah tererosi karena kurangnya kemampuan keuangan pemerintah, semakin meningkatnya permasalahan sosial dan semakin merasuknya ideologi ekonomi pasar,

yang memanifestasi pada keinginan tanpa batas untuk memperoleh keuntungan dan persaingan bebas (Gern, 1995).

Selanjutnya menurut Gern, sejauh mana akibat yang telah ditimbulkan ideologi-ideologi semacam ini terhadap pelayanan masyarakat, rasionalitas keputusan sosial, perimbangan kekuatan, dan kondisi kehidupan semua orang hampir-hampir tidak pernah terpikirkan. Satu-satunya *rationale* yang digunakan hanyalah: Kita tidak bisa begini terus, kita harus menjadi kompetitif, kita harus memasuki kancha globalisasi. Sikap seperti ini sekaligus mencerminkan meningkatnya rasa ketidakpastian. Sejauh mana kemungkinan meningkatnya anomie dalam konteks seperti itu?

Di banyak negara non-industri, menurut Gern, rusaknya sistem ekonomi, keuangan, pemerintahan dan sistem sosial pada umumnya disebabkan tekanan krisis telah memunculkan tingkat anomie yang tinggi. Dalam keadaan yang paling kritis satu-satunya kemungkinan yang dapat dilakukan adalah sekedar bertahan untuk hidup. Ini berarti kembali kepada keadaan subsisten, kembali kepada cara hidup tradisional. Tetapi pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial yang terus berlangsung tidak memungkinkan untuk kembali kepada cara hidup sebelumnya. Benar bahwa kembali kepada cara hidup berdikari dan subsisten atau kepada pola-pola organisasi di luar sistem komersial yang berlaku sekarang sedikit banyak bisa membantu mengatasi anomie. Tapi masalahnya adalah, berapa harga yang harus dibayar, dan prospek apa yang bisa diharapkan dari perjalanan mundur semacam ini?

Permasalahan yang sedang dialami di tanah air persis seperti yang dikemukakan Gern di atas. Menurut laporan instansi berwenang, seperti BPS, sudah lebih limapuluh persen penduduk Indonesia sekarang berada di bawah garis kemiskinan, suatu kenaikan yang hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya krisis. Program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan dewasa ini jelas menunjukkan bahwa tak ada yang dapat dilakukan untuk penduduk miskin yang semakin bertambah besar jumlahnya kecuali membantu mereka sekedar bertahan hidup.

Sementara itu persoalan besar yang perlu mendapat pemecahan mendesak di era reformasi ini adalah kapan dan sejauh mana masyarakat bisa mendapatkan kembali hak-hak yang telah terenggut sebagai akibat cara pengelolaan dan proses pembangunan di masa lalu.

Ini tentu bukan suatu perkara yang mudah. Karena tuntutan untuk pemulihan hak-hak itu terjadi hampir dalam segala bidang kehidupan. Di bidang politik masyarakat menuntut kehidupan yang lebih demokratis. Suara rakyat, terutama di daerah, minta dipertimbangkan dalam pengambilan setiap keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka. Untuk dapat mencapai kehidupan politik yang demokratis itu diharapkan tercipta pemerintahan yang tidak hanya sekedar memenuhi asas legalitas, tetapi mendapat legitimasi seluruh warganegara serta memenuhi rasa keterwakilan segenap kelompok masyarakat.

Di bidang ekonomi masyarakat menuntut keadilan dalam mendapat kesempatan berusaha dan kerja. Monopoli dan pemihakan terhadap kepentingan sekelompok kecil warganegara yang menguasai sebagian besar kekayaan nasional sudah tidak dapat diterima lagi. Di bidang sosial pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Di bidang keamanan masyarakat menginginkan terciptanya rasa tenteram. Aparat keamanan diharapkan tidak lagi bertindak sebagai penguasa. Dan juga bukan sebagai kekuatan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti rakyat. Tetapi sebaliknya justru sebagai pelayan, sebagai mitra pelindung rakyat dari berbagai tindakan kesewenangan.

Segala macam bentuk protes, unjuk rasa, keresahan dan kerusuhan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut menyiratkan bahwa tingkat anomie yang dialami masyarakat memang sudah cukup serius. Penyebab utamanya tidak lain adalah akumulasi dari berbagai deprivasi atau perenggutan terhadap hak-hak yang dianggap wajar dimiliki setiap warganegara dari suatu negara yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah sampai pada tingkat mana anomie tidak menimbulkan situasi *chaos* yang bisa berakibat fatal terhadap eksistensi dan integrasi bangsa? Atau jelasnya, sampai batas mana keresahan dan kerusuhan yang terjadi dalam masyarakat luas masih dapat diatasi sebelum anomie sebagai faktor destabilisasi mematangkan situasi bagi terjadinya proses disintegrasi sosial yang dapat mencabik-cabik keutuhan bangsa ini? Dan langkah-langkah alternatif apa yang dapat digunakan untuk mencegahnya? Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat prediktif ini patut dan perlu dikemukakan

agar berbagai permasalahan sosial yang berdimensi luas sekarang ini dapat ditempatkan pada perspektif yang lebih sesuai.

Anomie dan Revolusi Sosial

Amien Rais pernah dianggap terlalu berlebihan ketika mengatakan bahwa Indonesia bisa mengalami disintegrasi seperti bekas Yugoslavia bila tuntutan untuk mendapat keadilan dari berbagai daerah yang selama ini dirugikan oleh proses pembangunan nasional tidak terpenuhi. Demikian pula beberapa waktu sebelum menjadi presiden Abdurrahman Wahid yang pernah menyatakan apabila tuntutan-tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai cara tidak segera diakomodasi melalui langkah-langkah dan tindakan yang nyata akan bisa menyulut terjadinya revolusi sosial, juga ada yang menganggap sebagai berlebihan.

Kedua tokoh yang menjadi panutan luas masyarakat itu tentu punya alasan masing-masing untuk pernyataannya itu. Namun seberapa besar kemungkinan akan terjadinya disintegrasi bangsa dan revolusi sosial itu sangat tergantung pada seberapa jauh dan seberapa cepat segala tuntutan realistik yang dikumandangkan masyarakat luas dapat diakomodasikan. Selain itu seberapa berhasil upaya yang dilakukan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi keadaan anomie dalam masyarakat yang telah menyebabkan tererosinya kestabilan kehidupan kolektif.

Kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional tampaknya telah dapat diperkecil. Salah satu Ketetapan MPR yang dihasilkan dalam Sidang Istimewa beberapa waktu yang lalu mengamanatkan pengaturan perimbangan anggaran pendapatan dan belanja antara pusat dan daerah, dengan memberikan porsi semakin besar kepada daerah untuk menikmati pendapatan yang diperoleh di daerah masing-masing. Ini sedikit banyak tentu telah dapat meredam keinginan daerah tertentu untuk memisahkan diri dari negara kesatuan.

Yang tetap menjadi masalah besar adalah disintegrasi sosial. Seperti telah dikatakan, keadaan anomie negatif yang cukup parah tampaknya telah memperlihatkan ciri-cirinya dalam masyarakat kita. Gejalanya yang antara lain miskinnya masyarakat akan norma-norma dan nilai sebagai pegangan dalam melakukan tindakan atau *normlessness* serta tidak diindahkannya segala aturan yang berlaku

atau *lawlessness* telah sangat memudahkan sebagian warga masyarakat untuk dihasut dan ikut melakukan berbagai perbuatan destruktif.

Pendekatan sekuriti dan penegakan hukum atau *law enforcement* semata tampaknya tidaklah akan memadai untuk mengatasinya. Bahkan bisa saja malahan memperburuk situasi. Pengalaman masa lalu sudah cukup mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang bersifat fisik dan represif hanya akan menyebabkan rasa dendam dan antipati dari masyarakat, terutama yang menjadi korban. Tindakan-tindakan represif yang didasarkan pada pendekatan keamanan atau *security approach* itu, untuk meredam kerusuhan yang berpangkal pada ketidakpuasan mengenai berbagai hal yang meluas dalam masyarakat tidak dapat lagi dikatakan sebagai suatu pilihan yang populer. Lagipula cara demikian tidak akan menyentuh akar masalah. Bahkan bisa berakibat bertambah jauhnya bangsa kita dari tatacara pergaulan internasional yang semakin *civilized*.

Dari penelitian yang dilakukan LIPI tahun 1996 terhadap siswa SMU di lima kota besar, Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang terungkap bahwa sekitar 40% dari responden mengaku tidak lagi bisa membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Jadi jelas gejala ketiadaan nilai, *normlessness* sebagai salah satu ciri anomie telah melanda sebagian yang cukup besar dari generasi muda. Sementara juga terungkap lebih 50% merasa pesimis terhadap masa depannya. Apabila di kalangan orang muda yang lebih terdidik saja sudah terlihat gejala yang memprihatinkan seperti itu, dapat diperkirakan di kalangan angkatan muda yang lebih rendah pendidikannya persentasenya akan lebih besar lagi.

Sekiranya angkatan muda yang menunjukkan gejala anomie ini ikut direkrut sebagai bagian dari satuan penegak ketertiban dan keamanan masyarakat dapat dibayangkan berbagai penyimpangan yang bisa terjadi di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya. Penyimpangan yang paling serius, seperti diperkirakan sebagian orang, ialah terjadi dalam bentuk adu domba dan konflik sesama warga masyarakat dan perampasan hak asasi manusia. Berbagai kasus tindak kekerasan yang terjadi di Aceh dan Ambon belakangan ini jelas membuktikan ramalan seperti itu. Amuk massa yang semakin meluas karena rasa tidak puas terhadap kesulitan dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang semakin menumpuk bila dihadapi oleh petugas keamanan yang menderita anomie, justru akan lebih memperbesar

kemungkinan terjadi situasi *chaos*, kekacauan luar biasa, yang akhirnya tidak dapat dihindari akan mengarah kepada suatu revolusi sosial.

Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan dan langkah apapun yang menyangkut kehidupan masyarakat luas yang berada pada kondisi serba sulit sekarang ini kearifan luar biasa sangatlah diperlukan. Pendekatan psikologi sosial benar-benar harus diterapkan agar dampak yang sangat merugikan kehidupan bangsa dapat dihindari. Kemungkinan yang mengarah pada terjadi atau tidaknya revolusi sosial memang sangat ditentukan seberapa jauh pemerintah memahami dan merespon secara positif segala tuntutan perubahan menuju masyarakat yang lebih berkeadilan yang dikehendaki masyarakat.

Dalam era di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan andalan utama untuk kemajuan suatu bangsa penyelesaian permasalahan sosial, seperti juga permasalahan di bidang-bidang lainnya, sudah selayaknya dilakukan dengan pendekatan keilmuan. Salah satu langkah pemecahan yang seyogyanya diambil ialah melakukan pemahaman secara komprehensif dan sistemik tentang segala faktor yang berkaitan dengan timbulnya anomie. Baik faktor-faktor yang bersifat eksternal, seperti penuruan pandangan dan gaya hidup masyarakat industri modern yang tidak kompatibel dengan budaya sendiri, maupun faktor-faktor internal seperti praktek-praktek paternalisme serta pencampuradukan urusan negara dan keluarga yang terbukti telah merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Apabila semua faktor dominan yang menimbulkan anomie ini dapat diketahui dan tingkat anomie dalam masyarakat dapat diukur maka berbagai alternatif pemecahan masalah yang lebih sesuai akan lebih mungkin ditemukan.

Sistem Deteksi dan Peringatan Dini

Untuk masa sekarang dan terlebih pada waktu yang akan datang pemecahan masalah sosial tampaknya tidak dapat lagi didasarkan pada asumsi-asumsi, data serta informasi yang tidak komprehensif. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan sosial pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya tidak cukup lagi didasarkan pada *database* atau *information base*, tetapi sudah

seyogyanya didasarkan pada *knowledge base*. Artinya data dan informasi yang ada perlu dianalisis dan diinterpretasikan terlebih dahulu dengan menggunakan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang relevan. Hasil interpretasi ilmiah inilah yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Hal ini tentu juga berlaku dalam hal pemecahan masalah sosial melalui pendekatan anomie. Secara metodologis pendekatan konsep anomie sebagai salah satu cara untuk memahami dan memecahkan masalah sosial sebenarnya sudah berkembang cukup jauh. Kelompok penelitian anomie dari *Swiss Institute of Development* misalnya telah mengembangkan seperangkat instrumen yang teruji melalui penelitian di berbagai negara guna mengukur tingkat anomie. Empat variabel utama yang digunakan adalah (1) tingkat ketidakpercayaan kepada lembaga pemerintahan, (2) tingkat ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, (3) tingkat pesimisme menghadapi masa depan dan (4) tingkat ketidakmampuan dalam memahami perubahan yang sedang terjadi atau anomie individu. Secara sederhana dapat dikatakan, misalnya, apabila sekelompok masyarakat yang diteliti menunjukkan persentase yang cukup rendah (sekitar 10%) pada keempat variabel itu maka dapat dikatakan bahwa tingkat anomie yang dialami masih belum begitu merisaukan. Tetapi jika telah berada di atas rata-rata 25% ini merupakan peringatan bagi pengambil keputusan tentang adanya hal-hal yang tidak beres dalam masyarakat tersebut. Langkah-langkah penanggulangan perlu segera dipikirkan untuk mengatasinya.

Metode pengkajian anomie dan perubahan sosial telah mengarah seperti cara kerja peramalan cuaca. Semua variabel yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya anomie dan perubahan sosial dikumpulkan dan diamati dari waktu ke waktu sebagai cara deteksi. Bila kondisi mulai menunjukkan titik kritis maka peringatan dini perlu dikeluarkan agar keadaan yang semakin memburuk dapat diatasi. Adalah Johan Galtung, bapak penganjur ilmu perdamaian, dalam berbagai kesempatan yang menganjurkan perlunya disusun *early detection system* atau sistem deteksi dini (SDD) dan *early warning system* atau sistem peringatan dini (SPD) bagi pengamatan anomie dan perubahan sosial secara berkelanjutan ini. Meskipun ia tidak dengan jelas menyarankan bentuk wadah yang akan menyusun dan bertanggungjawab secara kelembagaan melaksanakan kegiatan sistem-sistem tersebut, namun yang jelas pakar-pakar keilmuan yang relevan

tentu perlu dilibatkan. Kegiatan ini mungkin saja lebih tepat diwadahi dalam sebuah lembaga seperti Dewan Ketahanan Nasional. Sebab SPD yang didasarkan pada SDD memang diperlukan lembaga ini guna memperkuat argumentasi dalam mendesak pemerintah untuk *do something* bila terjadi sesuatu yang tidak beres dalam masyarakat.

Penutup

Tulisan ini telah mencoba menjelaskan secara singkat tentang seberapa besar kemungkinan terjadinya revolusi sosial ditinjau dari pendekatan konsep anomie. Sebagai rangkuman dapat dikatakan bahwa kemungkinan terjadinya revolusi sosial itu sangat ditentukan oleh seberapa jauh kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengurangi ketidakpastian akan terpenuhinya berbagai tuntutan perubahan politik, ekonomi dan sosial yang dikehendaki masyarakat. Ketidakpastian itu merupakan suatu prakondisi bagi semakin lunturnya norma-norma dan nilai-nilai yang bisa dijadikan pegangan atau *normlessness*, suatu keadaan yang disebut anomie.

Tingkat anomie semakin tinggi yang dialami oleh individu, suatu kelompok atau komunitas akan dengan mudah menjurus pada tindakan destruktif. Tindakan ini merupakan bentuk pelampiasan rasa tidak puas yang memuncak yang merupakan salah satu manifestasi dari anomie itu sendiri. Tindakan destruktif yang paling gawat adalah amuk massa yang meluas, yang dapat mengarah pada revolusi sosial.

Sementara itu tindakan represif sekalipun mendapatkan pembenaran secara yuridis dan legal tidaklah akan dapat memberi penyelesaian yang langgeng terhadap masalah yang timbul sebagai reaksi terenggutnya apa-apa yang dianggap masyarakat sebagai hak asasinya. Cara yang paling arif untuk mengatasi masalah sosial adalah menghilangkan penyebab ketidakpuasan itu, yang antara lain dengan cara mengembalikan kepada masyarakat segala sesuatu yang sewajarnya menjadi hak mereka.

Mengingat semakin terkaitnya Indonesia dengan konstelasi pergaulan internasional dalam segala bidang kehidupan, permasalahan sosial dengan sendirinya juga menjadi semakin kompleks. Pemecahan permasalahan sosial yang berskala besar tidak mungkin lagi didasarkan pada asumsi-asumsi dan hasil pengamatan sepiantas. Pemecahan masalah yang berbasis pengetahuan atau *knowledge base*

seperti yang semakin banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan industri merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Sebab hanya dengan cara demikian masyarakat akan segera dapat dipersiapkan mencapai suatu tatanan kehidupan baru yang penuh persaingan kualitas di arena interaksi global. Mengambil analogi dari manajemen bisnis, ajakan Tom Peters untuk selalu *in search of excellence*, berusaha mencapai yang terbaik, dan himbauan Rosabeth Kanter untuk menjadi *world class*, mencapai kelas dunia, dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin berkualitas kiranya patut mendapat pertimbangan.

Daftar Pustaka

- Atteslander, Peter (ed.), 1995, *Social Destabilization and the Development of Early Warning System* (Edisi Khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 15 No. 8, 9, 10).
- Cernea, Michael, 1995, *Social Organization and Development Anthropology* (The World Bank: Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series No. 6).
- Gern, Jean-Pierre, 1995, "Economic Globalization and Anomie", dalam Atteslander, Peter (ed.), 1995, *Social Destabilization and the Development of Early Warning System* (Edisi Khusus *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 15 No. 8, 9, 10).
- Kanter, Robert Moss, 1995, *World Class: Thrifting Locally in the Global Economy*. New York: Simon and Schuster.
- Merton, Robert K., 1957, *Social Theory and Social Structure*. Glencoe, Illinois: The Free Press.
- Peter, Tom, 1986, *In Search of Excellence*. New York: The Free Press.

Swiss Institute of Development, 1998, *Report on Anomie Research, 1994-1997*.

Thomson, Kenneth, 1985, *Readings from Emile Durkheim*, New York: Tavistock Publications.

Turner, Jonathan, Leonard Beeghly dan Charles H. Powers, 1989, *The Emergence of Sociological Theory*. Belmont, CA: Wadworth Publishing Company